

PENYEBARAN INFORMASI PEMERINTAHAN MELALUI WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

ZAKY RAMADHAN
NPP 31.1068

*Asdaf Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua
Program Studi Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan*

Email: zakyramadhan561@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Irfan Uluputty, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The utilization of the @keyyapenkab.go.id website by the community and local government in Yapen Islands Regency is not yet optimal in terms of benefits and usage. Although the website has met aspects of transparency, accountability, conditionality, participation, equality of rights, and balance of rights and obligations, there are deficiencies in network infrastructure and data servers, as well as low public knowledge about using information technology. **Objective:** This study aims to understand and analyze the dissemination of public information through the @keyyapenkab.go.id website in Yapen Islands Regency. **Method:** This research employs a descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results/Findings:** The results of the study indicate that the use of the @keyyapenkab.go.id website has been utilized by the community and local government in accordance with its functions. However, the benefits aspect of this website still needs improvement. The website is used by the Protocol and Leadership Communication Section of the Yapen Islands Regency government to carry out its duties and functions in obtaining, managing, and disseminating government information to the community. The main problems found are the lack of network infrastructure and data servers, as well as the low public knowledge about using information technology. **Conclusion:** To enhance the effectiveness of the @keyyapenkab.go.id website, efforts are needed to improve network infrastructure, provide adequate data servers, and conduct socialization and workshops for the community on using this website.

Keywords: Protocol and Leadership Communication Section, Indicators, Public Information, Website

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penggunaan website @kepyapenkab.go.id oleh masyarakat dan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen belum optimal dari segi manfaat dan pemanfaatannya. Meski website ini telah memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasi, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban, terdapat kekurangan infrastruktur jaringan dan data server serta rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan teknologi informasi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebaran informasi publik melalui media website @kepyapenkab.go.id di Kabupaten Kepulauan Yapen. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan website @kepyapenkab.go.id telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat sesuai dengan fungsinya. Namun, aspek manfaat dari website ini masih perlu ditingkatkan. Website ini digunakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam mendapatkan, mengelola, dan menyebarkan informasi pemerintah kepada masyarakat. Permasalahan utama yang ditemukan adalah kekurangan infrastruktur jaringan dan data server serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan teknologi informasi. **Kesimpulan:** Untuk meningkatkan efektivitas website @kepyapenkab.go.id, perlu dilakukan upaya peningkatan infrastruktur jaringan, penyediaan data server yang memadai, serta sosialisasi dan workshop kepada masyarakat mengenai penggunaan website ini.

Kata Kunci: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Indikator, Informasi Publik, Website

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan merupakan proses penyelenggaraan urusan-urusan oleh pemerintah untuk kepentingan warganya, yang pada dasarnya adalah amanat rakyat yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah (Abdullah, 2016). Sejak awal kehidupan manusia, pemerintahan sebagai seni pengelolaan kekuasaan telah hadir. Kepentingan yang berbeda dalam kehidupan kelompok cenderung menciptakan disharmoni, sehingga kehadiran seseorang yang kuat yang dapat memelihara aturan main yang harus ditaati oleh semua pihak menjadi pertanda lahirnya sebuah pemerintahan. Pemerintahan dibentuk dengan tujuan utama menjaga ketertiban dalam suatu sistem di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan mereka dengan normal.

Secara esensial, pemerintahan modern berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat (Rahmawati, 2020). Fokus utama pemerintahan bukan hanya melayani masyarakat, melainkan juga menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitas mereka untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, tugas-tugas inti pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan, yaitu: menjamin keamanan negara, memelihara ketertiban, menjamin perlakuan yang adil, melakukan pekerjaan umum, meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat, dan menjaga sumber daya alam serta lingkungan hidup (Farid dan Ari, 2021).

Tugas-tugas tersebut menunjukkan jangkauan tugas yang luas dan kompleks, dengan tanggung jawab yang sangat berat terpicul di pundak setiap pemerintah. Fungsi pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian, dan pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan. Inilah misi pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Pemerintahan adalah serangkaian proses menegakkan dan memelihara keadilan, menjamin perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap warga negara, dan memberi pelayanan bagi kemajuan Bersama (Salvator dan Heremba, 2022).

Tujuan pokok pembentukan pemerintahan adalah untuk menjaga keberlangsungan suatu tatanan sosial yang tertib, di mana masyarakat dapat menjalani kehidupan secara teratur. Esensi dari pemerintahan modern adalah memberikan layanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak hadir semata-mata untuk memenuhi kebutuhan internalnya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu mengembangkan potensi dan kreativitasnya untuk mencapai kemajuan bersama. Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat (Uthama et al., 2022).

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai penyediaan layanan yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan (Andini, 2021). Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, pelayanan publik mencakup semua kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan publik merupakan usaha memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah (Dwiyanto, 2006).

Negara, yang dibangun oleh masyarakat, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah atau birokrasi diharapkan dapat efektif memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Pelayanan publik mencakup berbagai kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepentingan masyarakat. Perkembangan zaman modern membawa berbagai inovasi baru, salah satunya adalah kemajuan dalam teknologi. Teknologi memberikan manfaat signifikan dengan mempermudah manusia dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, termasuk dalam berkomunikasi. Melalui media sosial, seseorang dapat berinteraksi secara terbuka, efektif, dan efisien untuk menyampaikan informasi kepada orang lain yang memiliki latar belakang dan kepentingan yang beragam (Amalia, 2020).

Peningkatan arus informasi merupakan tantangan signifikan bagi lembaga pemerintah, terutama Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemerintah Kabupaten Kepulauan

Yapen yang memiliki peran utama dalam mengelola komunikasi publik. Dalam tugas-tugasnya, Prokopim bertanggung jawab memastikan akses masyarakat terhadap informasi, memperkuat partisipasi publik dalam kebijakan, serta mendukung transparansi pemerintah. Peran strategis Humas Pemerintahan menjadi semakin penting dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat, terutama dengan perkembangan teknologi informasi.

Melalui upaya komunikasi, pemerintah dapat mengklarifikasi program dan kebijakannya kepada publik, memastikan pemahaman serta keterlibatan masyarakat terhadap inisiatif tersebut. Selain itu, Humas Pemerintahan memiliki tanggung jawab memperkuat program-program pemerintah dalam konteks sistem politik, yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan dukungan terhadap pelaksanaan pemerintahan di tingkat nasional, regional, dan lokal. Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang bertanggung jawab atas fungsi Humas Pemerintah, mengkoordinasikan upaya perencanaan, persiapan, dan implementasi komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah, sejalan dengan Instruksi Presiden No. 09 Tahun 2015 tentang keterbukaan informasi publik.

Guna memperbaiki layanan informasi terkait program kerja pemerintah dan memastikan penyebarluasannya di tengah masyarakat, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendorong pemerintah daerah memanfaatkan platform media sosial. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 83 tahun 2012, yang memberikan pedoman terkait penggunaan media sosial oleh instansi pemerintah di Indonesia.

Saat ini, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan penyebaran informasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan yang terjadi di pemerintahan. Beberapa pemerintah daerah yang dinilai sudah efektif dan mendapatkan penghargaan dalam penyebaran informasi berbasis digital adalah Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah meraih penghargaan tingkat bintang 4 dalam Top Digital Implementation 2022 atas upayanya dalam menyebarkan informasi. Penghargaan ini diperoleh karena pemerintah kota tersebut berkomitmen terus-menerus untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah kota Tangerang Selatan telah mengembangkan beragam aplikasi yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik, salah satunya adalah website Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang berisikan berbagai macam layanan yang memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan serta informasi (Moleong, 2017).

Pada bulan April tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhasil meraih penghargaan dalam acara beritajatim award dalam kategori pengelolaan website pemerintah daerah terbaik. Keberhasilan ini diperoleh karena pemerintah daerah secara konsisten berupaya menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui platform website yang mereka miliki (Chandratama, 2020).

Namun di Indonesia, masih terdapat pemerintah daerah yang penyebaran informasinya belum terlalu maksimal atau belum efektif, salah satunya adalah Kabupaten Ngada. Layanan informasi publik di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi melalui portal website portal.ngadakab.go.id, telah berjalan dengan cukup baik, tetapi belum mencapai optimalitas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya keterbatasan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah setempat. Selain itu, tingkat sosialisasi kepada

masyarakat juga masih kurang, sehingga masih banyak warga yang belum mengetahui tentang keberadaan website resmi pemerintah.

Pemerintah harus terus meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi perubahan lingkungan yang cepat dan efektif berperan sebagai penghubung untuk membangun hubungan baik dengan publik melalui komunikasi yang efisien. Standar pelayanan yang inklusif dan terbuka telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik. Pemerintah harus secara transparan menyampaikan informasi mengenai program, kebijakan, serta kinerja mereka dengan akuntabilitas yang tinggi. Pendekatan komunikasi yang dianut harus saling berinteraksi, responsif, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.

Berdasarkan berbagai sumber, terlihat bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanan informasi digital. Ini mencakup penggunaan videotron di Alun-Alun Serui dan pemanfaatan website keypapenkab.go.id oleh bagian Humas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyebarkan informasi dan komunikasi yang menjadi sarana penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Yapen menggunakan bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) untuk mengelola proses penyampaian informasi publik kepada masyarakat.

Tugas penyampaian informasi publik dilakukan oleh Prokopim Pemerintah bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi. Mereka berperan sebagai pelopor dalam memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen melalui berbagai media yang tersedia, khususnya melalui website. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan penyampaian informasi publik oleh Prokopim tersebut, masih terdapat beberapa hambatan, termasuk kurangnya pemanfaatan fitur media website oleh Prokopim dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pembuatan situs web Pemerintah Daerah bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan Pemerintah Daerah, serta ikut berpartisipasi dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet dan teknologi lain yang akan muncul di kemudian hari. Situs web Pemerintah Daerah dibuat sesuai dengan keinginan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Merujuk pada penjelasan di atas, penelitian ini berfokus pada penyebaran informasi pemerintahan melalui website Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana proses penyampaian informasi oleh pemerintah kepada masyarakat serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan informasi publik yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dibahas, terdapat beberapa kesenjangan yang masih belum terjawab secara memadai (Sinambela, 2006). Misalnya, penelitian oleh Seniwarni (2020) mengungkapkan bahwa mekanisme kerja humas di Kabupaten Mamasa tidak terintegrasi dengan baik, menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penyebaran informasi. Namun, penelitian ini

tidak menjelaskan secara mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan ketidakterintegrasian tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meneliti lebih lanjut mengenai integrasi mekanisme kerja humas yang efektif dalam penyebaran informasi publik.

Penelitian oleh Suryani Barimbing (2022) dan Mifta Faridc (2021) menunjukkan efektivitas penyebaran informasi melalui media sosial dan periklanan dalam pembangunan daerah. Namun, keduanya tidak membahas secara spesifik bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses penyebaran informasi tersebut dan dampaknya terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penelitian-penelitian ini lebih berfokus pada hasil akhir tanpa menggali lebih dalam mengenai interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami peran masyarakat dalam menyebarkan dan menerima informasi pembangunan serta bagaimana hal ini dapat meningkatkan partisipasi aktif mereka.

Selain itu, penelitian oleh (Sugiyono, 2018) dan Budi Santoso (2023) menunjukkan bahwa keterbukaan informasi melalui media sosial efektif dalam memberikan layanan informasi dan mempromosikan pariwisata. Namun, penelitian ini tidak membahas tantangan yang dihadapi dalam menjaga akurasi dan kepercayaan informasi yang disebar. Dengan semakin meningkatnya penggunaan media sosial, risiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks juga meningkat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi strategi yang dapat digunakan oleh humas pemerintah dalam memastikan keakuratan dan kepercayaan informasi yang disebar melalui media sosial.

1.3. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi peran humas dalam penyebaran informasi publik di berbagai daerah (Barimbing dan Oktavia, 2022). Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas, tantangan, dan strategi yang digunakan oleh humas pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Seniwarni pada tahun 2020 berfokus pada peran bagian humas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa dalam penyebaran informasi publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif induktif dan menemukan bahwa penyebaran informasi di bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa dilakukan melalui mekanisme kerja yang tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya, terjadi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan fungsi dan peran mereka dalam menyebarkan informasi (Seniwarni, 2020).

Penelitian kedua dilakukan oleh Suryani Barimbing pada tahun 2022 dengan judul "Peran Hubungan Masyarakat (Humas) dalam penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkalis Riau". Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan menunjukkan bahwa kinerja periklanan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendukung inisiatif dalam peningkatan korespondensi dan komunikasi yang luas. Hasilnya, mereka berhasil menyebarkan data kemajuan kabupaten dan mendokumentasikan waktu perbaikan daerah dalam menyebarkan informasi pembangunan daerah (Barimbing, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Mifta Faridc pada tahun 2021 meneliti efektivitas media sosial dalam penyebarluasan informasi pembangunan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan berdasarkan teori uses and effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran dan penerimaan informasi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada masyarakat terjadi secara efektif dan efisien. Informasi terbaru yang dibagikan oleh pemerintah dapat langsung diakses oleh masyarakat, dan pemerintah mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat atas informasi yang dibagikan melalui media sosial resmi (Faridc, 2021).

Penelitian keempat dilakukan oleh Siska Ayu Lestari pada tahun 2022 yang meneliti peran humas lingkungan hidup dalam memberikan layanan informasi melalui media sosial pada masyarakat Kabupaten Mesuji. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menemukan bahwa keterbukaan informasi publik kepada masyarakat merupakan hak yang wajib disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Informasi mengenai lingkungan hidup disebarluaskan melalui email dan beberapa media sosial sebagai media penyebarannya (Lestari, 2022).

Penelitian terakhir dilakukan oleh Budi Santoso pada tahun 2023 yang meneliti strategi pemerintah Kota Surakarta melalui media sosial dalam penyebarluaskan informasi pariwisata Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menemukan bahwa strategi humas pemerintah Kota Surakarta dalam menyebarkan informasi pariwisata melalui media sosial termasuk dalam karakteristik model public relations two-way asymmetric. Penelitian ini membuktikan bahwa informasi pariwisata yang disebarluaskan telah berhasil dan berdampak positif terhadap warga serta pariwisata di Kota Surakarta (Santoso, 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan wawasan yang berharga mengenai peran dan efektivitas humas dalam penyebaran informasi publik melalui media sosial dan mekanisme lainnya. Namun, kesenjangan penelitian yang masih ada mengindikasikan perlunya fokus lebih lanjut pada integrasi mekanisme kerja humas untuk meningkatkan konsistensi dan efektivitas penyebaran informasi. Penelitian ini akan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakterintegrasian serta strategi yang dapat diterapkan untuk memperbaikinya, memberikan kontribusi pada pemahaman praktis dalam bidang komunikasi publik.

Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara menyeluruh membahas interaksi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks penyebaran informasi pembangunan. Dengan memperdalam pemahaman tentang bagaimana keterlibatan masyarakat mempengaruhi partisipasi mereka dalam pembangunan daerah, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada teori dan praktik komunikasi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Terakhir, dalam konteks penggunaan media sosial oleh pemerintah dalam menyebarkan informasi publik, penelitian sebelumnya telah menyoroti manfaatnya namun belum mendalami tantangan dalam menjaga akurasi dan kepercayaan informasi. Penelitian ini akan mengidentifikasi strategi yang efektif untuk mengatasi risiko informasi yang tidak akurat atau hoaks dalam konteks komunikasi publik digital, menjawab panggilan untuk solusi yang lebih cermat dalam era informasi yang semakin kompleks dan terkoneksi.

1.5. Tujuan.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas penyebaran informasi pemerintahan melalui website Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam era digital saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Penelitian ini akan mengidentifikasi sejauh mana website pemerintah daerah tersebut memenuhi fungsi komunikasinya, serta mengukur tingkat aksesibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan melalui platform digital ini (Priyatna et al., 2020).

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menyebarkan informasi melalui website resmi mereka (Semiawan, 2021). Dengan memahami faktor-faktor yang menghambat efektivitas penyebaran informasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi masalah tersebut. Identifikasi hambatan ini mencakup analisis teknis, manajerial, serta sosialisasi penggunaan website kepada masyarakat setempat, yang kesemuanya penting untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Tujuan terakhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi yang praktis dan aplikatif kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi publik melalui website. Rekomendasi ini diharapkan tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas informasi yang disajikan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami bagaimana informasi pemerintah diseminasi melalui situs web pemerintah Pulau Yapen. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap cara informasi diseminasi, persepsi masyarakat terhadap informasi tersebut, dan dampaknya dalam konteks lokal. Fokus pada interpretasi dan makna dari perspektif partisipan dan pengalaman mereka dalam menggunakan situs web pemerintah menjadi inti dari pendekatan ini (Suryani, 2019).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam diarahkan pada pemangku kepentingan utama seperti pengguna aktif situs web pemerintah dan administrator situs. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan insight yang mendalam tentang pengalaman mereka dalam mengakses dan menggunakan informasi dari situs web pemerintah. Observasi partisipatif dilakukan untuk memahami secara langsung interaksi masyarakat dengan situs web pemerintah, serta untuk mengamati praktik dan pola penggunaan situs secara real-time (Tohirin, 2007).

Pemilihan sampel dilakukan secara bertujuan (*purposive sampling*) untuk memilih responden yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan terkait dengan topik penelitian ini. Kriteria

inklusi untuk sampel melibatkan pengguna aktif situs web pemerintah Pulau Yapen yang bervariasi dalam latar belakang dan demografi. Pendekatan bertujuan ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan representatif terhadap populasi pengguna situs web pemerintah yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan induktif, di mana data dikodekan, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang muncul dari data wawancara dan observasi. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti pembuatan kode, pengelompokan kode menjadi tema, dan pengembangan narasi deskriptif yang menjelaskan temuan utama. Pendekatan induktif ini memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas informasi yang diseminasi melalui situs web pemerintah Pulau Yapen dari perspektif masyarakat pengguna.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian, termasuk persetujuan partisipan, kerahasiaan data, dan pengelolaan konfidensialitas informasi yang dikumpulkan. Langkah-langkah etika ini diimplementasikan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan memperhatikan hak dan kesejahteraan partisipan serta integritas data yang diperoleh dalam studi ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Transparansi Pelayanan Publik

Transparansi dalam pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen dapat diukur melalui dua indikator utama: adanya pelayanan yang terbuka dan kemudahan akses website oleh masyarakat umum. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen (Pemda) telah aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya akses informasi dan cara menggunakannya melalui Videotron yang terpasang di alun-alun Kota Serui. Upaya lainnya termasuk peningkatan bandwidth dan penambahan infrastruktur telekomunikasi untuk memastikan akses internet yang lancar di seluruh wilayah. Meskipun demikian, tantangan seperti kendala jaringan dan kurangnya literasi digital di kalangan beberapa lapisan masyarakat masih menjadi perhatian.

3.2. Akuntabilitas Pelayanan Informasi

Akuntabilitas dalam pelayanan informasi diukur dari kewajiban Pemda untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan atau tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi secara akurat melalui website resmi. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Pemda untuk menjaga transparansi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

3.3. Kondisional Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi yang kondisional mengacu pada kemampuan Pemda untuk merespons kebutuhan dan karakteristik masyarakat dengan tepat. Website Pemda dirancang untuk memastikan informasi yang disediakan mudah diakses tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan kebutuhan aksesibilitas

dan keakuratan informasi. Prokopim secara rutin menyaring dan memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan, memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah objektif dan relevan.

3.4. Partisipatif Pelayanan Informasi

Pendekatan partisipatif dalam pelayanan informasi melibatkan aktifnya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan. Pemda telah membuka ruang partisipasi melalui fitur "Hubungi Kami" dan integrasi dengan media sosial populer untuk menerima masukan langsung dari masyarakat. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Pemda tidak hanya meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan tetapi juga memperkuat hubungan dengan masyarakatnya.

3.5. Kesamaan Hak Pelayanan Informasi

Prinsip kesamaan hak dalam pelayanan informasi menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan layanan informasi tanpa diskriminasi. Pemda berkomitmen untuk menyediakan akses yang merata dan adil terhadap informasi publik melalui website mereka, memastikan bahwa tidak ada lapisan masyarakat yang terpinggirkan dalam mendapatkan manfaat dari pelayanan yang disediakan.

Penyebaran informasi pemerintahan melalui website Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, tantangan seperti infrastruktur teknologi dan literasi digital masih perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua warga dapat merasakan manfaat penuh dari upaya transparansi dan partisipatif ini. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan aksesibilitas dan keakuratan informasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat pelayanan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen dalam meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi melalui website mereka menjadi sebuah contoh yang baik bagi pemerintah daerah lainnya untuk mengikuti, dengan memperhatikan keberlanjutan, inovasi teknologi, dan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menyoroti peran Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Kabupaten Kepulauan Yapen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi publik melalui website resmi Pemda. Temuan ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam penyebaran informasi, sejalan dengan penelitian oleh Suryani Barimbing (2022) yang menemukan bahwa periklanan pemerintah Kabupaten Bengkalis berhasil menyebarkan data kemajuan kabupaten dengan efektif. Keduanya menekankan pentingnya strategi komunikasi yang baik dan pemanfaatan media untuk meningkatkan keterbukaan informasi.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan partisipatif dalam pelayanan informasi, dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui

fitur interaktif seperti "Hubungi Kami" dan media sosial. Hal ini serupa dengan temuan Budi Santoso (2023) yang meneliti strategi humas pemerintah Kota Surakarta melalui media sosial untuk mempromosikan pariwisata, yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi. Kedua penelitian menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan dan responsivitas pemerintah.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penelitian ini, seperti kendala jaringan dan kurangnya literasi digital di beberapa kalangan masyarakat, menunjukkan kesamaan dengan penelitian Seniwarni (2020). Seniwarni menemukan bahwa ketidakkonsistenan dan kurangnya integrasi mekanisme kerja menghambat penyebaran informasi di bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa. Kedua penelitian ini menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur dan peningkatan literasi digital untuk mengatasi hambatan dalam penyebaran informasi publik.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kesetaraan akses informasi publik, dengan upaya Pemda untuk menyediakan akses yang merata melalui peningkatan infrastruktur dan bandwidth. Ini sesuai dengan temuan Mifta Faridc (2021) yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin mampu menyebarluaskan informasi dengan efektif dan efisien. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa dengan strategi yang tepat dan pemanfaatan teknologi, informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi mereka dalam pemerintahan.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa temuan menarik yang patut didiskusikan lebih lanjut. Pertama, transparansi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen terbukti mengalami peningkatan signifikan. Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Daerah dalam memperluas akses informasi melalui penggunaan teknologi, seperti peningkatan bandwidth dan integrasi dengan media sosial, memberikan dampak positif dalam meningkatkan keterbukaan dan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dalam menyampaikan informasi secara merata di seluruh wilayah kabupaten, terutama yang masih terkendala oleh infrastruktur jaringan.

Kedua, aspek akuntabilitas dalam pelayanan informasi juga menjadi sorotan penting. Pemda telah menunjukkan komitmennya untuk bertanggung jawab dalam mengelola dan menyajikan informasi yang akurat serta tidak memihak. Langkah-langkah seperti penyaringan berita dan persetujuan dari pihak terkait sebelum publikasi menunjukkan upaya serius dalam menjaga integritas informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Namun, perlu ditingkatkan lagi dalam memastikan bahwa proses akuntabilitas ini diterapkan secara konsisten dan transparan dalam setiap aspek pelayanan publik yang dilakukan.

Terakhir, prinsip partisipatif dalam penyediaan pelayanan informasi telah diwujudkan melalui adanya ruang partisipasi aktif masyarakat melalui fitur seperti konsultasi publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan langsung terhadap kebijakan atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Meskipun sudah ada langkah-langkah positif dalam mendorong partisipasi ini, perlu terus ditingkatkan lagi dalam menyediakan berbagai platform yang lebih inklusif dan mudah diakses agar partisipasi masyarakat semakin luas dan berdampak signifikan bagi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyebaran informasi pemerintahan melalui website Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen serta mengidentifikasi upaya dan kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif eksploratif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan seluruh pegawai di bagian Prokopim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi pemerintahan melalui website Pemda telah mencapai tingkat yang baik dengan beberapa catatan penting.

Pertama, aspek transparansi dalam penyebaran informasi sudah dapat dikategorikan baik. Pemerintah Kabupaten telah memperluas aksesibilitas informasi melalui teknologi yang memungkinkan masyarakat dengan mudah mengakses informasi penting. Namun, tantangan terutama terkait dengan kesenjangan infrastruktur jaringan yang masih membatasi akses informasi di beberapa wilayah.

Kedua, akuntabilitas dalam penyampaian informasi pemerintahan melalui website juga sudah tergolong baik. Proses penyaringan dan penyebaran informasi dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa konten yang dipublikasikan bersifat obyektif dan tidak memihak, meskipun masih diperlukan konsistensi dalam penerapan prosedur ini.

Selanjutnya, dimensi kondisional dan partisipatif juga telah ditekankan dalam penelitian ini. Pemerintah Kabupaten telah berupaya untuk mengelola informasi secara komprehensif dengan memperhatikan aspek kondisional dan memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan melalui platform digital.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa catatan penting. Misalnya, masih terdapat tantangan dalam memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memahami dan dapat mengakses website Pemda dengan baik. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknologi di kalangan pegawai serta kebutuhan untuk memperluas jaringan internet di daerah yang masih terisolasi menjadi hambatan utama dalam meningkatkan efektivitas penyebaran informasi pemerintahan melalui platform digital.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen terus meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya website sebagai sumber informasi resmi. Selain itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menggunakan dan memberikan masukan melalui platform digital ini. Pemda juga perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk pelatihan teknologi bagi pegawai serta memperluas infrastruktur jaringan internet untuk meningkatkan aksesibilitas informasi di seluruh wilayah. Dengan demikian, penyebaran informasi pemerintahan dapat lebih efektif dan inklusif bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini meliputi keterbatasan dalam populasi responden yang hanya mencakup pegawai di bagian Prokopim dan mungkin tidak mencakup perspektif dari masyarakat umum secara luas. Selain itu, penggunaan metode kualitatif eksploratif dapat memiliki subjektivitas tertentu dalam interpretasi data, meskipun langkah-langkah validasi seperti triangulasi dapat mengurangi potensi bias. Keterbatasan infrastruktur jaringan di beberapa daerah juga mempengaruhi aksesibilitas informasi, yang dapat memengaruhi representasi keseluruhan hasil.

Arah masa depan penelitian,

Untuk masa depan Penelitian disarankan untuk melakukan studi yang lebih mendalam dengan memperluas sampel responden termasuk masyarakat umum dan stakeholder lainnya. Penelitian dapat melibatkan survei yang lebih luas untuk mengidentifikasi persepsi dan pengalaman pengguna dalam menggunakan website Pemda. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang implementasi teknologi baru seperti aplikasi mobile atau platform interaktif lainnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses informasi pemerintahan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang lebih komprehensif dan relevan untuk mendukung peningkatan efektivitas dan aksesibilitas informasi pemerintahan di masa depan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh pegawai bagian Prokopim Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah bersedia memberikan wawasan dan waktu mereka untuk wawancara serta memberikan dokumentasi yang berharga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan selama proses penelitian ini, serta kepada teman-teman dan keluarga atas dukungan moral dan semangatnya. Terima kasih atas kolaborasi dan kontribusi berharga yang telah memberikan nilai tambah pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dudung, 'Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah', *Jurnal Hukum Positum*, 1.1 (2016), 83 <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>
- Amalia Yunia Rahmawati, 'Peran Humas Dinas Lingkungan Hidup Dalam Memberikan Layanan Informasi Melalui Media Sosial Pada Masyarakat Kabupaten Mesuji', July, 2020, 1–23
- Farid, M Mifta, and Muhammad Ari, 'Efektivitas Media Sosial Dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuasin', 6 (2021), 95–106 <Http://Repository.President.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/3700>
- Lestari, S. A. (2022). **Peran humas lingkungan hidup dalam memberikan layanan informasi melalui media sosial pada masyarakat Kabupaten Mesuji**. Salvator, Marselinus, and Nanang K. Heremba, 'Efektivitas Penyebaran Informasi Publik Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Soppeng', *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 3.1 (2022), 42–55
- Uthama, Mohamad Rizqi, Iyep Saefulrahman, and Idil Akbar, 'Efektivitas Media Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Bandung (Studi Tentang Pemanfaatan Media

- Sosial Humas Kota Bandung Dalam Penyebarluasan Informasi Program Kerja Pemerintah Bidang Kesehatan Tahun 2020), *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1.2 (2022), 156 <https://doi.org/10.24198/janitra.v1i2.38249>
- Andini, Fajrina Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 'Memaksimalkan Peran Humas Pemerintah Melalui Media Sosial', 2021 <https://birokesra.babelprov.go.id/content/memaksimalkan-peran-humas-pemerintah-melalui-media-sosial>
- Dwiyanto, Agus, 'Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik', UGM Press, 2006
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2017
- Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan, Dan Implementasi*, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2018
- Barimbing, Suryani, and Yunisa Oktavia, 'Peran Hubungan Masyarakat (Humas) Dalam Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Di Bengkalis Riau', *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6 (2022), 121–26
- Chandratama Priyatna, Centurion, F X Ari, Agung Prastowo, Fajar Syuderajat, and Anwar Sani, 'Optimalisasi Teknologi Informasi Oleh Lembaga Pemerintah Dalam Aktivitas Komunikasi Publik', *Jurnal Kajian Komunikasi*, 8.1 (2020), 45-63
- Semiawan, Conny R., 'Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter Dan Keunggulan', *Jurnal Penelitian*, 2021, 33–39
- Suryani, Suryani, 'Layanan Informasi Publik Dan Partisipasi Publik', *Studia Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.2 (2019), 63–76 <https://doi.org/10.47995/jik.v2i2.25>
- Tohirin, 'Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah Dan Madrasah (Berbasis Integrasi)', 2007